

**PENGARUH MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT TERHADAP
PENYEBARAN TENAGA KERJA INDONESIA DIBIDANG
PROFESIONAL PARIWISATA DI ERA MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN TAHUN 2015-2017**

Oleh : Bela Safira

Email : bellasyafira776@gmail.com

Pembimbing : Dr. Afrizal, S.IP., MA

Bibliografi: 8 Jurnal, 7 Buku, 3 Skripsi, 2 Majalah, 51 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63277

Abstract

The Mutual Recognition Arrangement (MRA) is one of the important elements in the mobilization of Professional workforce in the ASEAN region, including the Tourism Professional MRA which is a driving force in improving Tourism standards and improving the qualifications of Tourism workforce in the ASEAN region. The implementation of AEC in 2015 makes ASEAN member countries have to prepare the quantity and quality of the Tourism Professional workforce.

The author uses a Liberal Institutional perspective to describe ASEAN as a regional institution that guides member countries in implementing free markets in order to improve the regional economy. Currently, the liberalization of professional workforce, especially in the field of tourism professionals, has become involved in multilateral trade in seeking conformity with standards, especially in the field of tourism.

This is important for the Indonesian Tourism Professional workforce in improving human resources. The Indonesian workforce, which is still dominated by a relatively low level of workforce education, indicates the need for increased certification to be able to improve the quality of the workforce in this sector and be able to continue to lead in the number of workers as well.

Keywords: ASEAN, MEA, Free Market, Tourism Employment, MRA, Certification

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat berdampak pada semakin hilang batas-batas kedaulatan negara. Akibatnya integrasi dan kerjasama regional ataupun internasional menjadi salah satu ukuran yang turut menentukan eksistensi suatu negara. Pada akhirnya integrasi dan kerjasama luar negeri akan membentuk sebuah konsep baru yaitu regionalism.

Regionalisasi adalah suatu bentuk kerjasama kawasan untuk memudahkan proses masuknya kapital, teknologi, dan mobilitas manusia. Regionalisasi menjadikan batasan, kendala, atau hambatan negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain menjadi semakin kecil bahkan negara sebagai sebuah identitas kawasan yang mempunyai kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri diharuskan untuk meminimalkan hak yang melekat tersebut. Regionalisme untuk membentuk sebuah komunitas ekonomi bertujuan untuk menciptakan sebuah situasi yang efektif dan kondusif sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing negara-negara anggotanya dalam menghadapi pasar bebas dunia.

Sistem perekonomian yang bergeser ke arah pasar bebas serta kondisi proses negosiasi perdagangan di bawah *World Trade Organization* (WTO) yang lambat mendorong beberapa negara di Asia Tenggara membentuk kerjasama regional yaitu *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN). Didirikannya ASEAN pada awalnya untuk tujuan politik, mengupayakan

perdamaian, dan keamanan di Asia Tenggara namun kemudian memulai inisiatif untuk membentuk konversi ekonom regional.

Negara harus melakukan kerjasama dalam memudahkan mobilitas sektor jasa dalam situasi kawasan yang menerapkan prinsip perdagangan pasar bebas. ASEAN menekankan perlunya liberisasi perdagangan jasa melalui penerapan *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS). Kerangka ini dibentuk untuk menghilangkan pembatasan perdagangan dalam layanan antar negara anggota dan memperkuat daya saing sektor jasa ASEAN. Selain itu diperkuat pula dengan adanya pembuatan *ASEAN Economy Community* (MEA) yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dalam liberalisasi aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja trampil dan perpindahan modal secara lebih bebas.¹

MEA diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN dengan mendorong negara-negara anggota untuk meliberalisasikan berbagai sektor perekonomian, serta menciptakan arus perdagangan yang bebas tanpa hambatan. Melalui MEA, negara-negara anggota memiliki kesepakatan bersama dalam menyatukan perekonomian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing serta mendorong pertumbuhan ekonomi. MEA juga bertujuan untuk

¹ Perundingan Jasa, "ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)", Agustus 2016, DGITN (*Directorate General of International Trade Negotiation*), <http://ditjenppi.kemendag.go.id/asean-framework-agreement-on-services-afas-2/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2020

mengembangkan perekonomian negara-negara ASEAN yang kemudian akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan persaingan yang kompetitif dan saling terintegrasi satu sama lain antara negara-negara anggotanya.²

Penerapan MEA ini terfokuskan di Indonesia tentunya akan memberikan pengaruh yang kuat yang akan mentadangkan efek positif yang sangat penting untuk dimanfaatkan serta dampak negatif yang harus diantisipasi. Indonesia dapat dipastikan akan dihadapkan oleh bermacam tantangan dan resiko yang bisa saja muncul. Tantangan dan resiko yang akan muncul ini disebabkan karena masih rendahnya mutu pendidikan bagi tenaga kerja, masih kurangnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, rapuhnya sektor industri yang dikarenakan ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi, pasokan energi yang terbatas, lemahnya Indonesia dalam menghadapi serbuan impor, lajunya peningkatan ekspor dan impor serta banyaknya kesamaan produk.³

Selain itu Indonesia juga mempunyai peluang yang sangat besar dalam menghadapi MEA. *Pertama*, Indonesia mempunyai potensi pasar potensial, hal ini dikarenakan negara ini memiliki jumlah penduduk terbesar diantara

negara anggota ASEAN dan juga merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan mempunyai wilayah luas. Hal tersebut dapat menjadikan negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang produktif, ekonomi kreatif, dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan dengan kesempatan penguasaan pasar investasi. *Kedua*, Indonesia merupakan negara tujuan investor ASEAN. *Ketiga*, Indonesia berpeluang menjadi negara pengekspor.

Keempat, lancarnya pasokan pasokan bahan baku dan baku serta karen tidak adanya hambatan dari tarif dan non tarif. *Kelima*, Indonesia dengan jumlah populasi terbesar akan memperoleh keunggulan tersendiri yang disebut sebagai bonus demografi.⁴ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk mengekspansi pasar tenaga kerja di ASEAN dengan tenaga kerja Indonesia yang dimiliki.

Dilihat dari berbagai macam sektor yang telah diliberalisasikan dalam kawasan ASEAN, ada pula sektor yang menjadi penting untuk negara anggota terutama Indonesia, ialah sektor pariwisata. Dalam sektor ini setiap negara akan menunjukkan kualitas dan kuantitas daerah wisatanya masing-masing demi menarik minat wisatawan untuk mengunjungi negaranya. Sektor pariwisata juga dapat menunjang pembangunan negara dan juga

²Gita Paramita Agustin, "Masyarakat Ekonomi Asean Setelah Tiga Tahun Pengimplementasian Di Indonesia". Vol.2 No.2 Mei 2018

³ Umar Congge, "Masyarakat Ekonomi Asean Harapan Dan Tantangan Dalam Prekonomian Bangsa". <https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/2188/1114> Diakses pada 23 Oktober 2020

⁴ Stanislaus Risadi Apresian, "Arus Bebas Tenaga Kerja Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean: Ancaman Bagi Indonesian?", Indonesian Perspective, vol.1 no.2 Juli-Desember 2016

menjadi salah satu faktor yang strategis dalam rangka meningkatkan devisa negara dan juga pendapatan masyarakat.⁵

Kerangka Teori

a. Perspektif liberalisme

Perspektif liberal menyadari bahwa prinsip kebebasan dan kesetaraan politik dapat terancam seiring dengan meningkatnya kekuatan ekonomi. Untuk liberalisme, adanya peran intervensi negara dalam pengaturan ekonomi guna memenuhi kebutuhan dasar manusia dan memperluas kesempatan untuk memperoleh kebutuhannya. Liberalisme tidak melihat adanya perbedaan antara dunia domestik dan internasional, liberal mengklaim bahwa beberapa rangkaian hubungan antara orang-orang melampaui perbatasan nasional. Pemerintah perlu, tapi sentralisasi kekuasaan itu dianggap buruk dan kebebasan individu merupakan kepentingan politik tertinggi.⁶

Dalam liberalisme mengenai kerjasama dalam perdagangan bebas masih dilakukan atas dasar efisiensi ekonomi dan sebagai satu-satunya cara untuk mengintegrasikan negara

⁵ "Kerjasama Ekonomi ASEAN", Kementerian Luar Negeri Indonesia <https://www.kemlu.go.id/Documents/Kerjasama%20Ekonomi%20ASEAN.doc> diakses pada 1 Mei 2020

⁶ Jill steans , Lloyd Pettiford ,Thomas Diez, Imad El-Anis., *An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes*, (Routledge, 2013).

berkembang ke dalam ekonomi global serta menghapus pengaruh negara dalam hubungan perdagangan antara pelaku bisnis dan individu, serta penurunan kedaulatan ekonomi nasional untuk menyama-ratakan ekonomi politik setiap negara anggota masyarakat internasional.⁷

b. Tingkat Analisa : Internasional

Level analisis internasional memandang bahwa negara-negara di dunia ini dan interkasi mereka didalamnya sebagai suatu sistem. Struktur sistem yang telah terbentuk pada akhirnya menentukan perilaku dari aktor-aktor hubungan internasional yang terlibat didalamnya. Menurut level ini, sistem harus benar-benar dipahami dan selanjutnya membuat generalisasi yang tepat tentang sistem tersebut sebagai suatu keseluruhan.⁸

Tulisan ini memuat MRA yang merupakan sebuah langkah strategis yang coba diupayakan oleh ASEAN untuk memfasilitasi tenaga kerja agar keahlian dan ketrampilannya diakui oleh negara anggota ASEAN yang lain. Berfokuskan pada MRA yang disepakati oleh negara anggota ASEAN membuat keahlian dan keterampilan tenaga kerja diakui kualifikasinya di seluruh negara anggota ASEAN.

a. Teori Institusi Internasional

⁷ Scott Burchill, *Theories of International Relations*, Third Edition, (Palgrave Macmillan; New York, 2005)

⁸ Umar Suryadi Bakri, *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Institusi internasional dibuat dengan tujuan menampung kepentingan-kepentingan setiap negara. Institusi dibuat karena adanya keraguan dan ketidakpercayaan disetiap negara. Sehingga, institusi tersebut membantu mengurangi rasa tidak percaya diri negara anggota satu sama lain. Institusi itu menyediakan rasa kesinambungan serta stabilitas bagi setiap negara anggota untuk dapat memajukan kerjasama dan mendapatkan keuntungan satu dengan lainnya.⁹

Dari teori yang telah dijelaskan diatas, penulis akan lebih memfokuskan pada konsep-konsep yang dapat menjelaskan penelitian ini, yaitu adanya globalisasi ekonomi yang terjadi, serta institusi regional yang mendorong kerjasama negara anggota di kawasan dalam mengintegrasikan ekonomi kawasan. Globalisasi ekonomi dipengaruhi oleh adanya fenomena globalisasi yang merupakan penyebaran dan intensifikasi yang mencakup hal-hal mulai dari ekonomi, sosial, dan hubungan budaya di dunia internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Mutual Recognition Arrangement

Usaha mewujudkan MRA untuk para profesional di bidang pariwisata cukup kompleks karena melibatkan banyak stakeholders, mulai dari lembaga pemerintah (seperti

kementerian ketenagakerjaan, pendidikan, dan lembaga sertifikasi) hingga pihak swasta sebagai pemakai jasa profesional tersebut. Kompleksitas tersebut juga ditambah dengan adanya sensitivitas mengenai pergerakan profesional antarnegara ASEAN yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja profesional dan non-profesional di dalam negeri masing-masing negara ASEAN.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut harus didukung dengan kebijakan atau regulasi pemerintah. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia maka perekonomian dalam bidang-bidang yang ada didalam MRA akan meningkat dan dapat memajukan bidang tersebut dari sektor perekonomian termasuk dari bidang pariwisata di Indonesia.¹⁰

Pengaruh Mra Terhadap Penyebaran Tenaga Kerja Pariwisata Indonesia Ke Negara Asean Era Mea

Melihat hal ini tenaga kerja Indonesia harus mempersiapkan diri untuk melakukan persaingan tenaga kerja. Salah satunya dengan mengikuti sertifikasi untuk dapat mengikuti arus standarisasi tenaga kerja melalui MRA terfokuskan dalam bidang profesional pariwisata untuk mampu mengikuti arus pasar bebas tenaga kerja. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk dibahas Bagaimana Pengaruh MRA Terhadap Penyebaran Tenaga Kerja

⁹ Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*, (Oxford University Press: UK, 2013).

¹⁰ Stanislaus Risadi Apresian, "Arus Bebas Tenaga Kerja Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean: Ancaman Bagi Indonesia?", *Indonesian Perspective*, vol.1 no.2 Juli-Desember 2016

Pariwisata Indonesia Ke Negara ASEAN Dalam Era MEA 2015-2017.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN ini memiliki peluang besar untuk menjadi negara pendonor tenaga kerja bagi negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja migran tersebut, sehubungan dengan adanya integrasi ekonomi kawasan ASEAN. Kebutuhan untuk dapat menyalurkan tenaga kerja tersebut semakin mendesak mengingat saat ini lapangan kerja di Indonesia sudah tidak mampu lagi menampung seluruh angkatan kerja yang tersedia. Akibatnya, tingkat pengangguran menjadi tinggi dan berdampak pada timbulnya masalah ekonomi, seperti kemiskinan.

Bersamaan dengan peluang tersebut, integrasi kawasan ASEAN ini juga sekaligus menghadirkan ancaman serius bagi tenaga kerja sektor pariwisata di Indonesia. Melalui kerangka MRA, tenaga kerja sektor pariwisata ASEAN diwajibkan untuk memenuhi standar profesi tenaga kerja pariwisata sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama melalui sertifikasi profesi tenaga kerja yang diakui sesama negara anggota ASEAN. Ancaman tersebut timbul dikarenakan hingga saat ini sebagian tenaga kerja sektor pariwisata di Indonesia belum memiliki sertifikasi profesi tersebut. Akibatnya, jika tidak memiliki sertifikasi profesi, akan sulit untuk berkompetisi dengan tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya, bukan hanya di negara ASEAN lain, melainkan juga di Indonesia sendiri.

Usaha mewujudkan MRA untuk para profesional di bidang

pariwisata cukup kompleks karena melibatkan banyak *stakeholders*, mulai dari lembaga pemerintah seperti kementerian ketenagakerjaan, pendidikan, dan lembaga sertifikasi hingga pihak swasta sebagai pemakai jasa profesional tersebut. Kompleksitas tersebut juga ditambah dengan adanya sensitivitas mengenai pergerakan profesional antarnegara ASEAN yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja profesional dan non-profesional di dalam negeri masing-masing negara ASEAN.

KESIMPULAN

Penyebaran tenaga kerja profesional pariwisata Indonesia dengan adanya pemberlakuan MRA memberikan dampak yang baik terhadap kualitas tenaga kerja Indonesia, dengan terus di tingkatkannya sertifikasi terhadap tenaga kerja untuk terus peningkatan daya saing tenaga kerja di ASEAN. Hal ini menjadi penting karena dengan adanya MRA dalam mobilisasi tenaga kerja di era pasar bebas MEA menunjukkan bahwa MEA mampu meningkatkan perekonomian Indonesia serta negara anggota ASEAN lainnya. Liberalisasi pasar yang menjadi fokus MEA merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh ASEAN dalam melakukan integrasi ekonomi kawasan.

Mobilisasi tenaga kerja profesional pariwisata Indonesia ke negara ASEAN menjadi penting dikarenakan adanya persaingan diantara negara anggota ASEAN terkait tenaga profesional. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan MEA yang membuka pasar bebas serta penghapusan hambatan dalam

mobilisasi barang jasa dan investasi menjadikan kawasan ASEAN. Sektor pariwisata menjadi salah satu fokus Indonesia dikarenakan pariwisata menjadi sektor prioritas di beberapa negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Sektor pariwisata di Indonesia mampu memberikan devisa negara terbesar kedua setelah CPO di tahun 2016. Hal tersebut yang menjadikan Indonesia harus mempersiapkan diri selain infrastruktur tetapi kesiapan serta daya saing dari tenaga kerja profesional pariwisata di Indonesia agar mampu bersaing dengan negara anggota ASEAN lainnya.¹¹

Kondisi pariwisata ASEAN pula mendukung dalam integrasi ekonomi kawasan di ASEAN. Peningkatan sektor pariwisata mempengaruhi lahirnya kesepakatan MRA, terutama dalam profesional pariwisata. Dalam menghadapi persaingan tenaga kerja Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam ranah MRA dalam sektor Pariwisata, Indonesia dengan sigap telah mempersiapkan diri dengan adanya sertifikasi terhadap tenaga kerja pariwisata di Indonesia dengan adanya SKKNI serta BNSP dalam meningkatkan dan menghasilkan tenaga kerja profesional pariwisata yang telah tersertifikasi.

Pemberlakuan MRA terhadap tenaga kerja pariwisata menjadi penting dalam era MEA terutama tenaga kerja profesional

pariwisata di Indonesia. Daya saing tenaga kerja pariwisata Indonesia dengan negara lain masih terbelakang, tetapi masih menduduki posisi ke 4 diantara negara anggota ASEAN lainnya. Tetapi dengan adanya MRA dalam sektor Pariwisata memicu Indonesia untuk terus meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam sektor profesional pariwisata untuk terus bersaing dengan tenaga kerja pariwisata lainnya di negara anggota ASEAN.

Indonesia masih memiliki kekurangan dalam menghadapi pasar bebas tenaga kerja di era MEA terutama dalam sektor ini, ialah mengenai kualitas dari tenaga kerja yang disediakan, jika Indonesia tidak sigap dalam menghadapi ini dapat dengan mudah masuknya tenaga kerja profesional pariwisata negara anggota ASEAN lainnya masuk ke Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia setiap tahunnya membutuhkan tenaga profesional pariwisata semakin banyak dengan bertumbuhnya 10 destinasi wisata di Indonesia dan masuknya modal asing untuk berinvestasi di sektor ini.

Indonesia memang dapat dikatakan siap dalam menghadapi liberalisasi sektor tenaga kerja bidang profesional pariwisata, dengan jumlah tenaga kerja yang tersebar pada era MEA Indonesia menduduki puncak dengan total 3 juta tenaga kerja, tetapi masih ada kekurangan yang harus Indonesia perbaiki untuk dapat terus bersaing dengan negara anggota ASEAN lainnya terutama dari daya saing tenaga kerja yang Indonesia miliki

¹¹ Evie Benazir, *Komunikasi Politik Dalam Masyarakat* Menyosialisasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN, eISSN 2443-2660 Vol.20, No.2, Juli 2018

serta pendidikan tenaga kerja Indonesia yang masih di dominasi oleh pekerja pendidikan rendah, selain itu pula masalah bahasa, Indonesia masih dianggap rendah serta tertinggal dari negara anggota asean lainnya seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina. Selain itu pula masih diperlukan peningkatan dalam sertifikasi tenaga kerja agar setara dengan tenaga kerja profesional pariwisata dari negara anggota ASEAN yang lebih maju dan harus terus bertambah setiap tahunnya untuk dapat tersebar pula kenegara ASEAN.

Maka dari itu, diperlukannya peningkatan dari kemauan untuk para tenaga kerja terutama di sektor pariwisata untuk memiliki sertifikasi dan mengikuti kegiatan pelatihan kerja serta loka karya yang telah disediakan dan di fasilitasi oleh pemerintah. Potensi terhadap tenaga kerja profesional Indonesia sudah cukup baik tetapi harus tetap ditingkatkan agar mampu menghadapi liberalisasi pasar tenaga kerja dengan optimis.

DAFTAR PUSTAKA

- Evie Benazir, *Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Menyosialisasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, eISSN 2443-2660 Vol.20, No.2, Juli 2018
- Gita Paramita Agustin, “*Masyarakat Ekonomi Asean Setelah Tiga Tahun Pengimplementasian Di Indonesia*”. Vol.2 No.2 Mei 2018
- Jill steans , Lloyd Pettiford ,Thomas Diez, Imad El-Anis., *An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes*, (Routledge, 2013).
- Kerjasama Ekonomi ASEAN*”, Kementerian Luar Negeri Indonesia
<https://www.kemlu.go.id/Documents/Kerjasama%20Ekonomi%20ASEAN.doc> diakses pada 1 Mei 2020
- Perundingan Jasa,”*ASEAN Framework Agreement on Services(AFAS)*”, Agustus 2016, DGITN (*Directorate General of International Trade Negotiation*),
<http://ditjenppi.kemendag.go.id/asean-framework-agreement-on-services-afas-2/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2020
- Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*, (Oxford University Press: UK, 2013).
- Scott Burchill, *Theories of International Relations*, Third Edition, (Palgrave Macmillan; New York, 2005)
- Stanislaus Risadi Apresian, “*Arus Bebas Tenaga Kerja Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean: Ancaman Bagi Indonesian?*”, Indonesian Perspective, vol.1 no.2 Juli-Desember 2016
- Umar Congge, “*Masyarakat Ekonomi Asean Harapan Dan Tantangan Dalam Prekonomian Bangsa*”.
<https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view//2188/1114>
Diakses pada 23 Oktober 2020
- Umar Suryadi Bakri, *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).